



UNIVERSITAS WIRARAJA

PENGUATAN TRIPLE HELIX
PADA SEKTOR PARIWISATA

PENYUSUN:

ENZA RESDIANA, SE., M.AB

TITA TANJUNG SARI, M.PD

ISBN 978-602-50605-9-5



9

786025

060595



PENGUATAN TRIPLE HELIX PADA SEKTOR PARIWISATA

Penyusun : Enza Resdiana, SE., M.AB

Tita Tanjung Sari, M.Pd

Desain Sampul : Syaihol Hadi

Penata Letak : Matlimin

ISBN : 978-602-50605-9-5

ISBN 978-602-50605-9-5



PENERBIT

Universitas Wiraraja Sumenep

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 Patean Madura

(Telp. 0328-664272; Fax. 0328-673088)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Penguatan *Triple Helix* Pada Sektor Pariwisata”. Buku ini merupakan kristalisasi hasil penelitian yang dibiayai DIKTI.

Kami ucapkan Terima Kasih kepada Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayakan program ini kepada Tim Pelaksana, serta kami ucapkan Terima Kasih juga kepada segenap pihak yang telah membantu dan kerja sama yang telah dibangun selama program ini berlangsung sampai selesai.

Segala upaya dan kemampuan telah dikerahkan sekuat tenaga untuk dapat menyajikan tulisan ini dengan baik, rinci dan sistematis. Akan tetapi dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, dirasakan tulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi sempurnanya tulisan ini.

Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan bagi para pembaca.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1 Konsep Triple Helix	1
Bab 2 Peran & Tanggung jawab Pemerintah.....	8
Bab 3 Kepemimpinan Pengembangan Pariwisata	10
Bab 4 Pengertian Pelaku Wisata.....	12
Bab 5 Pengertian Wisata.....	15
Bab 6 Pengertian Pengembangan Wisata	17
Bab 7 Implementasi Peran Triple Helix	22
Bab 8 Analisa Implementasi Peran	51
Bab 9 Peran Triple Helix Dalam Kajian Teori	60
Bab 10 Rencana Upaya Pengembangan Wisata	75
Bab 11 Ringkasan dan Rekomendasi	77
Daftar Pustaka.....	80

BAB 1 KONSEP *TRIPLE HELIX*

Konsep *Triple Helix* merupakan interaksi antara universitas, industri, dan pemerintah yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Etzkowitz & Leydesdorff. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu juga menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis *Triple Helix* adalah bahwa antara akademisi, industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi (Etzkowitz dan Leydesdorff 2000). Kemudian menurut Wishnu dalam APECCEO Summit 2013 Indonesia, korelasi antara peran universitas, bisnis, dan pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan ketiga aktor integral dalam konteks *public-private-partnership* terjadi dalam sebuah konsep *Triple Helix*, yang dikenal dengan istilah ABG atau *Academic, Business & Government*. Dalam konsep *Academic, Business & Government*, industri berperan sebagai rumah produksi, sementara pemerintah adalah sumber hubungan kontraktual yang memastikan interaksi dan pertukaran yang stabil, dan universitas sebagai sumber pengetahuan dan teknologi baru. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan prinsip generatif dalam membangun ekonomi yang berbagi pengetahuan, yang memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat.

Pada dasarnya konsep *Triple Helix* ini melibatkan kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan masyarakat untuk saling memberikan dukungan serta perannya dalam pengembangan wisata. Sulistiyani (2017:97-99) menerangkan peran dari setiap aktor yang tergolong dalam Konsep *Triple Helix* yaitu Peran Pemerintah, Peran Swasta, dan Peran Masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam suatu pembangunan yang akan dilakukan karena dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai implementator, monitoring, evaluasi, mediasi, formulasi, dan penetapan (*Policy*). Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dapat berupa peraturan hukum, penganggaran yang menyediakan berbagai fasilitas seperti Dana, jaminan, alat, teknologi, *network*, sistem manajemen informasi serta edukasi terhadap penetapan kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan suatu pembangunan.

Dalam penjelasan diatas disebutkan bahwa pemerintah banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada pengambilan keputusan dan pendanaan. Untuk menjaga kualitas hasil pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan terutama untuk

mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar tidak merugikan masyarakat.

2. Peran Swasta

Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah bersama masyarakat. Peran demikian perlu untuk ditekankan supaya terjadi variasi analisis. Peran swasta dalam implementasi kebijakan mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pembangunan dan pengembangan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh dari proyek-proyek dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dengan demikian bentuk fasilitasi akan berupa penerjunan tenaga ahli dan terampil serta teknologi yang memadai.

3. Peran Masyarakat

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan akan tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam setiap proses kebijakan publik. Tidak semua masyarakat mampu memberikan input, saran, dan kritik pada level formulasi kebijakan, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara :

- a. Memberikan ruang untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dsb tanpa dibebani sanksi atau ancaman;
- b. Memberikan informasi secara transparan dan aksesibel kepada masyarakat yang menyangkut beberapa aspek;
- c. Pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan dengan melihat profesionalisme, kompetensi disamping nilai kepentingan masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan yang akan dilakukan.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengerahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain yang memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan suatu proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta.

Nurhidayati (2018) sebagaimana yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:82) mendefinisikan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk mendukung terjadinya perkembangan khususnya perkembangan wisata. Nurhidayati (2008) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat didefinisikan sebagai berikut Pertama, bentuk pengembangan khususnya pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan yang akan dilakukan. Kedua, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata. Ketiga, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dengan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung. Yang diungkapkan oleh Nurhidayati menjelaskan mengenai peran masyarakat sebagai bagian dari *Triple Helix* dan aktor yang signifikan untuk mewujudkan terjadinya perubahan dan perkembangan.

D'amore dalam Hadiwijoyo (2012:88) memberikan *guidelines* model bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang krusial dalam perkembangan yang akan dilakukan, yakni :

- a) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (*Resident*);
- b) Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal;
- c) Pelibatan penduduk lokal dalam industri;
- d) Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan;
- e) Partisipasi penduduk dalam *event-event* dan kegiatan yang luas;

- f) Produk wisata untuk menggambarkan identitas *lokal*;
- g) Mengatasi permasalahan yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh;

Dalam model ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Model pengembangan ini sangat sesuai dengan karakter atau jenis obyek dan daya tarik wisata yang bertumpu pada sumberdaya wisata yang berhubungan langsung dengan masyarakat lokal. Menurut Yoeti (2016:12-13) menjelaskan bahwa peran swasta adalah membantu pelayanan bagi wisatawan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh swasta untuk menunjang kebutuhan wisatawan, pelayanan kebutuhan yang dibutuhkan dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Jenis Perusahaan	Produk Yang Dihasilkan
<i>Travel agent</i>	Informasi paket wisata
Perusahaan penerbangan	<i>Seats</i> dan pelayanan lainnya
Angkutan pariwisata	Pelayanan transfer ke hotel, tujuan wisata
Akomodasi hotel	Kamar dan pelayanan lainnya
Restoran dan sejenisnya	Makanan dan minuman
<i>Impresariat, amusement</i>	<i>Entertainment</i> dan atraksi wisata
<i>Local tour operator</i>	<i>City tour</i>
<i>Shopping center</i>	Cendramata dan oleh-oleh
Bank	Penukaran dan pengambilan uang

<i>Retail stores</i>	Berbagai macam keperluan perjalanan
----------------------	-------------------------------------

BAB 2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA

Menurut UN-WTO dalam Pitana dan Diarta (2009:113) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut :

1. Membangun kerangka (*frame work*) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata;
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya;
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya;
4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja disektor pariwisata;
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana konkret yang mungkin termasuk didalamnya: (a) evaluasi kekayaan aset pariwisata alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya, (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kepetitif dan komparatif, (c) menentukan persyaratan dan ketentuan

penyediaan infrastuktur dan suprastuktur yang dibuthkan yang akan berdampak pada keragaan pariwisata dan, (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Menurut Pitana dan Diarta (2009:113), untuk mencapai kesuksesan dalam membangun pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Disisi lain pebisnis yang terlebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah.

Yoeti (2016:77) menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator atau sebagai pembuat kebijakan dapat secara langsung membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dengan bekerja sama dengan swasta serta pelibatan masyarakat daerah tersebut sehingga memiliki dampak baik untuk memberikan pinjaman pada pengangguran dengan menyerap tenaga kerja untuk proyek-proyek yang akan dibangun seperti : pembuatan jalan ke obyek wisata, jembatan, pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih, pembangunan tempat-tempat rekreasi, objek wisata, angkutan wisata, terminal dan lapangan udara, hotel, restoran, biro perjalanan, *souvenirshop* dll.

BAB 3. KEPEMIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Kegiatan kepariwisataan melibatkan banyak pihak yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat luas, masyarakat tujuan wisata, para profesional, dan para investor dikalangan swasta. Selain itu juga terdapat beberapa unsur masyarakat, pelaku, dan investor yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan. Hal ini berarti pembahasan mengenai kepemimpinan dalam pengembangan kepariwisataan mencakup kepemimpinan dikalangan pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini para aktor yang tergolong dalam konsep *Triple Helix* seperti Pemerintah, Swasta, dan masyarakat harus mampu untuk membentuk karakteristik kepemimpinan yang kuat sehingga mampu untuk membawa pariwisata bergerak seperti yang diinginkan. Beberapa model kepemimpinan yang dijelaskan oleh Yoeti (2016:328) dapat mengembangkan kepariwisataan yang bertumpu pada kualitas manusia dan masyarakat yaitu :

- 1) Kepemimpinan transformasional, dengan menggerakkan masyarakat atau institusi yang dipimpinya menuju keadaan yang lebih baik dengan mengembangkan dan menguatkan kesadaran tentang potensi, membantu mengembangkan lingkungan dan suasana lingkungan, meningkatkan kemampuan komunitas dengan menanggapi perubahan yang terjadi diluar, menjadikan kegiatan pariwisata bukan hanya sekedar kegiatan bisnis akan tetapi

sebagai kesempatan bagi komunitas untuk membangun sosial-budaya;

- 2) Kepemimpinan sinergistik, mencapai kemajuan dengan meningkatkan kemampuan kerja sama secara kreatif baik didalam komunitas atau institusi maupun kerjasama kreatif antarkomunitas dan institusi, yang dapat dilakukan dengan cara: membangun kepercayaan, membangun jejaring kerjasama dengan berbagai kelompok lain, menemukan landasan pijakan bersama dan menguatkan semangat tumbuh dan berkembang bersama;
- 3) Kepemimpinan visioner, memberikan arah pada pengerahan potensi masyarakat dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan: membangun dan mengembangkan kesepakatan mengenai karakteristik masa depan, mengembangkan kesadaran dan pemahaman mengenai dampak jangka panjang, memfokuskan usaha-usaha pada hal-hal yang membawa dampak positif, menumbuhkan *sense of purpose* dan memimpin proses perubahan.

BAB 4. PENGERTIAN PELAKU ATAU AKTOR WISATA

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik (2006:19-24) adalah:

1. Wisatawan diartikan sebagai konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
2. Industri pariwisata/penyedia jasa adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan utama, yaitu:
 - a) Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain;
 - b) Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku, atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya;

3. Pendukung Jasa Wisata, adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya;
4. Pemerintah, sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing-masing;
5. Masyarakat Lokal, diartikan sebagai masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumber daya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka;

6. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi non-pemerintah yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk di bidang pariwisata, seperti proyek WWF untuk perlindungan Orang Utan di Kawasan Bahorok Sumatera Utara atau di Tanjung Putting Kalimantan Selatan, Kelompok Pecinta Alam, Walhi, dan lain-lain. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43407/Chapter%20II.pdf?sequence=3>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018);

BAB 5. PENGERTIAN PARIWISATA

Definisi pariwisata terdapat pada Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab I pasal I mengenai ketentuan umum. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. (http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/K5410017_bab2.pdf . diakses pada tanggal 03 Agustus 2018).

Pariwisata menjadi suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak luar biasa yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfose dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal. (Gde Pitana 2005:109)

Dalam penelitian ini, Gili Labak sebagai obyek wisata yang terkenal akan potensi alamnya. Pulau ini menjadi salah satu primadona wisata di Kabupaten Sumenep dan Jawa Timur dengan ciri khas destinasi wisata alam berupa pantai dengan

keindahan pasir putih dan keindahan terumbu karang. Wisata favorit yang ditawarkan di pulau ini adalah snorkeling atau menyelam di permukaan laut.

Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1). Agar Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan objek wisata.

Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam (Yoeti, 1982). *(Risma Rosita. 2017. Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap Wisatawan (Studi Kasus : Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep Madura. diakses pada tanggal 31 Juli 2018).*

BAB 6 PENGERTIAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

A. Konsep Pengembangan

Dalam pengembangan pariwisata, baik pengembangan destinasi pariwisata maupun pengembangan potensi daya tarik wisata pada umumnya merupakan bagian dari sebuah strategi dalam upaya memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan terhadap suatu daya tarik wisata yang diawali dengan perencanaan yang matang dan bersifat holistik dengan memperhatikan berbagai potensi dan kondisi riil daerah setempat, sehingga memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata, pemerintah daerah dan wisatawan. Alwi dkk, (2005:538) mendefinisikan pengembangan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik, maju sempurna dan berguna. Jadi pengembangan pariwisata merupakan suatu proses/aktivitas memajukan pariwisata yang ditata sedemikian rupa dengan memajukan atau memelihara yang sudah ada agar menjadi menarik dan lebih berkembang.

Menurut Swarbrooke, yang dikutip dari (<http://www.scribd.com>, diakses 25/11/2011) terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu:

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi;

2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi;
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru;
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung;
5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur. (http://erepo.unud.ac.id/16757/3/1091061006-3-BAB_II.pdf. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018).

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik wisata lokal, regional atau ruang lingkup suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Alasan kedua pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah, dan candi-candi. Alasan ketiga pengembangan pariwisata untuk menghilangkan

kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, terutama bagi masyarakat di objek kepariwisataan itu dibangun (Oka A. Yoeti, 2008: 77-78). (<http://eprints.uny.ac.id/8536/3/BAB%20%20-%2008405241008.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018).

Menyatakan Undang-Undang R1 No 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7).

Pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik perencanaan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastuktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/ kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya (Pitana, 2009: 134).

Menurut Carter dan Fabricus (2007) dalam Sunaryo (2013: 172), berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan pariwisata paling tidak mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata. Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata;
2. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata. Berbagai fasilitas wisata yang perlu dikembangkan dalam aspek amenities paling tidak terdiri dari akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, toko cinderamata, pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, Biro Perjalanan Wisata, ketersediaan air bersih, listrik, dan lain sebagainya;
3. Pengembangan Aksesibilitas. Aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata, dan perangkat terkait lainnya;
4. Pengembangan *Image* (Citra Wisata). Pencitraan (*image building*) merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun citra atau *image* dibenak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antara aspek kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau *image* yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk.

Menurut Yoeti (2001 : 177), hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi

suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Daerah itu harus mempunyai “*something to see*” yaitu harus mempunyai obyek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain;
2. Di daerah tersebut harus mempunyai “*something to do*” di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, dan harus banyak disediakan fasilitas rekreasi atau *amusements* yang dapat membuat mereka betah di tempat itu;
3. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “*something to buy*”, ditempat tersebut harus tersedia *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagian oleh-oleh atau *souvenir* untuk dibawa pulang ketempat asal masing-masing. Selain itu juga harus ada sarana-sarana lain, seperti *money charger*, bank, kantor pos, kantor telpon, dan lain sebagainya.

BAB 7 IMPLEMENTASI PERAN *TRIPLE HELIX*

Konsep *Triple Helix* merupakan konsep pengembangan pariwisata yang melibatkan tiga aktor penting dalam pengembangan yang akan dilakukan, aktor penting tersebut yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling kerjasama dalam pengembangan pariwisata khususnya wisata Gili Labak. Tiga aktor ini memiliki peran masing-masing yang secara signifikan dapat membangun dan mengembangkan wisata. Dalam hal ini peneliti melakukan studi lapangan pada wisata pulau gililabak, melakukan wawancara dengan mengacu pada beberapa informan terkait dengan pengembangan wisata selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap situasi diwisata pulau Gililabak.

A. Peran Pemerintah

Dalam pengembangan pariwisata pemerintah memiliki peran memfasilitasi serta mendukung pengembangan wisata. Tentunya bentuk dukungan yang diberikan pemerintah dapat berupa regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama untuk saling mendukung pengembangan wisata sehingga pengembangan wisata yang dilakukan akan memiliki dampak yang positif bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep telah mengatur pengembangan wisata pulau Gili Labak dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah, berbagai macam sarana dan prasarana yang berasal dari beberapa Organisasi Daerah seperti tempat sampah, Gazebo, kamar mandi/Wc, tandon air, *speedboard*, dan sebagainya seperti yang dapat dilihat dalam beberapa dokumentasi dibawah ini



Gambar 7.1. Pembangunan MCK



Gambar 7.2. Pemberian tempat sampah Sebagai wujud Peran Dinas Lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan wisata Gililabak



Gambar 7.3 Stone Pembangunan Diving Center oleh Dinas Pariwisata dan Pembangunan MCK oleh Dinas PU.Cipta karya sebagai wujud mendukung sarana dan Prasarana wisata Gililabak



Gambar 7.4. Tandon air tawar sebagai Peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan air bersih untuk pengunjung wisata Gililabak

Untuk menyukseskan program pengembangan wisata atau yang disebut dengan Visit Sumenep 2018, diperlukan penguatan peran dari pemerintah Daerah dengan menggerakkan Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan program tersebut untuk saling berkerja sama dalam mendukung Program pengembangan pariwisata khususnya

pulau Gililabak. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah mampu untuk saling bekerjasama dan mendukung pengembangan wisata.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun dan mengembangkan pariwisata sebagaimana disampaikan oleh bapak **Bambang Hidayanto Susilo, SE**

Kasi Pengembangan Sumberdaya Pariwisata bahwa :

“fokus pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu pengembangan pariwisata, dan program Visit Sumenep 2018 adalah wujud dari komitmen dalam memajukan pariwisata daerah agar supaya memberi warna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep, karena akan merubah perekonomian masyarakat, karena akan berdampak pada dibangunnya, infrastruktur jalan, disambungnya listrik, serta dibangunnya sarana prasarana lainnya. Wujud nyata komitmen pemerintah memajukan pariwisata daerah adalah dengan dibukanya jalur penerbangan”.

Demikian pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, terus menggenjot pembangunan untuk menyukseskan kunjungan wisata di tahun 2018. Berbagai pembangunan dilakukan terutama di bidang infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan para wisatawan saat berkunjung ke Sumenep. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, bapak **Yayak Nur Wahyudi** mengatakan;

“Ketersediaan sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam program Visit Sumenep”.

“Infrastruktur dan transportasi menjadi fokus perhatian kami untuk menyambut Visit Sumenep Year 2018,”

(dikutip dari <https://newssatu.com/sumenep>)

Untuk mengembangkan sektor pariwisata maka harus dibangun infrastruktur yang memadai, sarana prasarana yang mendukung serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merata dan kesiapan sumber daya manusia berkualitas.

Disamping itu pula Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep melakukan pembenahan beberapa fasilitas wisata dalam rangka mendukung pencapaian target wisatawan mancanegara (wisman) pada program Visit Sumenep 2018. (<http://www.sumenepkab.go.id/berita>, 2018-01-25)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak **Bambang Hidayanto Susilo, SE Kasi Pengembangan Sumberdaya Pariwisata** bahwa :

“ Kami berharap dukungan semua elemen masyarakat, untuk menyukseskan pengembangan pariwisata utamanya menyukseskan program kunjungan wisata “Visit Sumenep 2018”, karena pengembangan pariwisata saat ini merupakan sektor yang paling menggairahkan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep mendapatkan dukungan

dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dengan dukungan dana APBD”.

Sedangkan untuk keterlibatan Badan Lingkungan Hidup bagi pengembangan pariwisata sebagaimana disampaikan oleh bapak **Ir. Agus Suprayogi** Sekretaris Badan Lingkungan Hidup adalah:

“Kalau keterlibatan ada sesuai tupoksi yang ada pada masing-masing dinas. semisal proses perizinan, untuk kebersihan dan lingkungan juga melalui dinas kebersihan, kemudain dari sisi sarana dan prasarana kita memba ntu tempat sampah di berbagai tempat pariwisata. Seperti kemaren di pantai sembilan itu ada, nah itu semua tujuannya untuk membantu pariwisata dari sisi lingkungan. Jadi ini kan bentuk keterlibatan masing-masing OPD sesuai tupoksi, kita sudah memberikan bantuan tempat sampah. cuma ya belum merata, karena kendalanya itu ya di pendanaan. Sehingga belum menjangkau keseluruhan”.

Sarana transportasi menuju destinasi wisata, dinyatakan oleh bapak bahwa sejumlah objek destinasi wisata di Sumenep yang ramai dikunjungi para pelancong itu berada di wilayah kepulauan perlu dibenahi, yaitu :

"Sarana transportasi (kapal/perahu) ke objek destinasi wisata ke pulau itu pun masih belum memadai, utamanya jika menggunakan standar wisatawan mancanegara. Masih banyak yang harus dibenahi dan tidak semuanya bisa ditangani oleh kami,"

Begitupun juga Bapak Sutrisno Kepala Bagian Badan Penanggulangan bencana Daerah menambahkan mengenai sarana dan prasarana wisata Gililabak:

“Kalau kami sering melakukan pemantauan ke Pulau Gililabak, untuk melihat situasi dan kondisi disana, kami melakukan pemantauan ke tempat wisata itu dalam satu minggu dua kali pemantauan, kami sering mengantar tamu ke sana karena memang kami memiliki perahu sendiri jadi enak langsung kesana, dan untuk transportasi wisatawan yang ingin ke Gililabak saya rasa mereka harus membooking perahu sendiri”

Hal sama disampaikan oleh Bapak Kun (Hotel C1) yaitu :

“Wisatawan kesulitan mendapatkan angkutan yang langsung menuju ke tempat wisata, masih harus mencari persewaan mobil pribadi padahal biayanya cukup mahal”.

“Tidak ada standart biaya atau ongkos yang ditawarkan oleh perahu jika harus ke pulau Gili Labak, jika ramai pengunjung biaya yang ditawarkan cukup mahal berbeda jika lagi sepi pengunjung biaya bisa lebih murah dari harga yang ditawarkan per orang Rp. 75.000 (minimal 10 orang)”.

“Perlu adanya trayek khusus angkutan umum menuju tempat wisata, serta perlunya perbaikan sarana jalan menuju tempat wisata”.

Sedangkan untuk pihak swasta sendiri siap mendukung berbagai program yang akan dijalankan untuk

pengembangan pariwisata, berikut kutipan pernyataan yang dilontarkan oleh bapak

“untuk segala program pemerintah kami selaku pihak usaha akan siap untuk mendukung segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Pemerintah, khususnya untuk pengembangan wisata Gililabak, pada tahun-tahun lalu kan banyak permintaan pengunjung untuk ke pulau Gililabak, tapi kembali lagi pada keseriusan pemerintah dalam pengembangannya”

Pihak masyarakat juga memberikan tanggapannya mengenai peran Pemerintah dalam hal regulasi pengembangan wisata yang dirasa masih kurang berkomitmen sehingga pariwisata yang dikembangkan hanya dapat bertahan dalam jangka pendek, berikut Bapak Abd Jalil Ketua RT 5 RW 3 Dusun Lembana

“Kalau pemerintah memang sudah banyak melakukan pengembangan wisata Gililabak, banyak bantuan-bantuan barang yang diberikan oleh Pemerintah, seperti tempat-tempat berteduh yang memang dibutuhkan, MCK, kamar mandi, tandon air tawar, musholla untuk beribadah, tetapi satu yang masih kurang komitmen pemerintah kita tidak mempunyai Dermaga sehingga perahu-perahu yang datang berkunjung langsung menepi ke tepi pantai”.

Selain itu Bapak Abd Jalil juga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga sering mengikutsertakan masyarakat dalam setiap event atau kegiatan yang akan dilakukan, seperti yang dinyatakan sebagai berikut ini

“Kalau ada kegiatan atau tamu dari mana yang dibawa oleh Pemerintah untuk berkunjung kesini juga kami juga dibentuk Pokdarwis yang dibina oleh Pemerintah dalam hal melayani pengunjung yang datang sehingga kami yang kesulitan dengan Bahasa merasa terbantu dengan adanya pemuda-pemudi yang termasuk dalam Pokdarwis ini tetapi untuk tahun ini memang sudah tidak ada lagi Pokdarwis yang dibentuk disini karena sekarang mereka memilih bekerja keluar jadi untuk sekarang ini kalau ada pengunjung kami yang melayani”

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada dasarnya Pemerintah Daerah telah banyak memberikan sumbangsih dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ada diwisata Pulau Gililabak seperti banyak bantuan dan barang-barang yang berasal dari Pemerintah Daerah seperti MCK, Kamar Mandi, tandon air tawar, penyerap panas, Panggung untuk kegiatan, saung, tempat santai dan sebagainya disamping itu juga terdapat kekurangan dari pihak pemerintah khususnya penyediaan Dermaga Perahu yang disana masih membutuhkan hal tersebut.

B. Peran Swasta

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan peran pemerintah sebagai fasilitator akan tetapi peran dari pihak swasta harus juga dibangun dalam rangka ikut mendukung pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, oleh karena itu, Pemerintah harus bekerjasama untuk mengembangkan

pariwisata khususnya Pulau Gililabak yang memiliki potensi besar untuk maju apabila dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait yaitu Swasta dan Masyarakat. Seperti yang dilakukannya wawancara terhadap beberapa pihak swasta penyedia layanan untuk pengunjung atau wisatawan, memang banyak yang menyebutkan bahwa pihak swasta mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini peran dari Swasta dikuatkan dengan adanya sumbangsih dalam pengembangan pariwisata pulau Gililabak sehingga sarana dan prasarana yang tidak dapat disediakan oleh Pemerintah dapat didukung dan disediakan oleh pihak swasta. Seperti dalam tabel dibawah ini yang menjelaskan beberapa pihak swasta yang terlibat dalam melayani wisatawan yang datang.

Tabel 7.1
Data Penginapan dan Hotel
Kabupaten Sumenep

NO	NAMA HOTEL / PENGINAPAN	LOKASI
1	Hotel Utami Sumekar	Jl. Trunojoyo 51 Sumenep
2	Hotel Sumekar	Jl. Trunojoyo 53 Sumenep
3	Hotel Wijaya I	Jl. Trunojoyo 45 / 47 Sumenep
4	Hotel Wijaya II	Jl. Wahid Hasyim No 3 Sumenep
5	Safari Jaya	Jl. Trunojoyo No. 90 Sumenep

6	Hotel Mitra Land	Jl Trunojoyo 191 Gedungan, Sumenep
7	Losmen Baitul Kamul	Jln. Gersik Putih – Kalianget
8	Wisma Sumekar	Jln. Trunojoyo No. 53 Sumenep
9	Family Nur	Jl. Sultan Abdurrahman 01 Bumi Sumekar Asri Sumenep
10	Hotel C1	Jl. Sultan Abdurrahman (Kompleks Perumahan Bumi Sumekar)
11	Hotel Suramadu	Jl. Trunojoyo 121 Kolor, Sumenep
12	Garuda Hotel Sumenep	Jl. Kamboja
13	Hotel Kangen	Jl. Manggeling, Kolor Sumenep
14	Hotel Musdalifah	Jl. Trunojoyo 292 Gedungan, Kecamatan Batuan

Sumber : www.pulaumadura.com › Hotel

Tabel 7.2
Data Usaha Pariwisata
Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata
Kabupaten Sumenep

NO	NAMA USAHA	ALAMAT
1	PT. Almaddinah Klabaan Guluk Guluk	Dsn Klabaan Daja Desa Guluk Guluk
2	PT. Arraudhah Abadi Indah	Jl. Jokotole Desa Gedungan Kec. Batuan
3	PT. Media Syaiful Qulub Madinah	Jl. Raya Dungkek No. 17 - 18 Ds Grujugan Kec Gapura
4	PT. Falisha Mulia Al – Hadi	Jl. Raya Sumenep - Pamekasan Ds Kapedi Kec Bluto
5	PT. Nata Bersama Tour & Travel	Jl. Adirasa No. 09 Ds Kolor Kec Kota Sumenep
6	PT. LAN Tabur Jaya Wisata	Jl. Raya Kapedi Ds kapedi Kec Bluto Kab Sumenep
7	CV. Jelajah Sumenep	Jl. Kartini No.30 Kel Kepanjin Kec Kota Sumenep
8	CV. Atira	Jl. Raya Pelabuhan No. 42A Ds Kalianget Timur
9	Cv. Kartika Dewi	Jl. Raya Gayam Ds Gayam Kab Sumenep
10	Cv. Laut Biru Express	Jl. Gersik Putih Barat No.

		53 Ds Kalianget Timur
11	CV. Citra Mandiri Wisata	Jl. Raya Pelabuhan Kalianget Ds Kalianget Timur
12	PT. Brama Rahayu	Jl. Dr. Wahidin 307 Kel Pajagalan Kec Kota Sumenep
13	PT. Azfa Nur Haromain	Jl.Pujangga 13A kel Kepanjin Kec Kota Sumenep
14	CV. Satu Tiga Utama	Jl. Mutiara No. 20A kel Bangselok Kec Kota Sumenep
15	CV. Surya Mandiri	Jl. Raya Gapura Gg Pipit Ds Parsanga Kec Kota Sumenep
16	PT. Anugrah Nurani Qanaah	Jl. Raya lenteng No. 29 Ds Kebunagung kec kota Sumenep
17	PT. Citra Raya Tour & Travel	Jl. Adirasa Kav. 09 Ds Kolor Kec Kota Sumenep
18	CV. Putri Tunggal	Dsn Sempangan Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget
19	PT. Balqis Jaya Selamanya	Jl. Lingkar Barat Ds Babbalan Kec Batuan Kab Sumenep

20	CV. Bersaudara	Jl. Raas Blok Q No. 11 Desa Pamolokan Kec Kota Sumenep
21	PT. Alfatih Cahaya Utama	Jl. Trunojoyo Gg. X No. 23 Desa Kolor Kec Kota Sumenep
22	CV. Madura Vacation	Jl. Pelabuhan No. 4 Ds Kebundadap Timur kec. Saronggi
23	PT. Alfindo Jaya Nusantara	Jl. KH. Mansyur Desa Pabian Kec. Kota Suemenep
24	CV. Kafilah Energi	Jl. Raya Sukajeruk No. 08 Dsn Ambulung Desa Sukajeruk

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Sumenep

Pihak Santos juga ikut mendukung pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan anggaran untuk keperluan sarana dan prasarana wisata Gililabak, bantuan yang diberikan oleh Santos berupa anggaran dana dan bantuan sarana dan prasarana wisata Gililabak seperti anggaran yang dibelikan tikar, kursi karet, sound sistem, penyerap sinar matahari, rumah singgah, Gazebo, kursi malas, panggung, payung dan sebagainya, bantuan ini diberikan dalam wujud mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata

di Kabupaten Sumenep. Berikut beberapa dokumentasi bantuan Santos SKK Migas untuk wisata Gililabak.



Gambar 7.6. Penyerap panas sinar matahari diberikan oleh Pihak Santos dalam mendukung pengembangan wisata Gililabak



Gambar 7.7 Panggung besi sebagai wujud peran Santos dalam mendukung pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah



Gambar 7.8. Pemberian Gazebo dan Rumah teduh, payung, kursi malas yang diberikan oleh Santos



Gambar 7.9 Pemberian tikar, sound sistem, kursi karet oleh Santos sebagai sarana dan prasarana wisata Gililabak Kabupaten Sumenep

Peran swasta dalam Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran mereka sangat membantu Pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah oleh sebab itu penguatan peran swasta memang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata yang akan dilakukan khususnya pengembangan wisata pulau Gililabak. Hal ini pemerintah ikut memberikan sumbangsih dana atau anggaran untuk membangun wisata yang ada, karena kalau hanya mengandalkan anggaran Pemerintah tanpa bekerja sama dengan pihak swasta maka pengembangan yang akan dilakukan akan sulit untuk sukses.

Terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep khususnya pengembangan wisata pulau Gililabak kemungkinannya bekerjasama dengan pihak swasta disampaikan oleh bapak Horry Sekretaris Dinas PU Bina Marga bahwa :

“seharusnya memang pemerintah menggandeng pihak swasta dalam mengelola wisata kalau hanya mengandalkan dana pemerintah APBD saja tidak akan bisa, pihak swasta dalam hal ini ikut membantu pembangunan pariwisata yang ada sehingga segala urusan pemerintah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, untuk saat ini terkait dengan bantuan pembangunan memang ada peran pihak swasta”

Sekretaris Dinas PU Bina Marga bapak **A.Horry** menyampaikan, bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam menyukseskan Visit Sumenep, yaitu:

“Untuk jalan kita tidak bisa hanya mengandalkan ABPD, DD atau ADD saja maka kami Dinas PU.BINA MARGA terus melakukan koordinasi yang intens baik dengan provinsi maupun dengan nasional (pusat)”. Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah ABPD saja tidak akan bisa seharusnya memang pemerintah menggandeng pihak swasta dalam mengelola wisata, untuk saat ini untuk pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pihak swasta masih belum terlihat pembangunannya, kalau bantuan ada misalnya dari pihak santos, pihak BPRS”.

Hal sama juga disampaikan oleh Kasi Pengaturan Pertanahan dan Pengendalian Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Bapak Eko Robby Subekti, ST,MM yaitu :

“Iya pihak swasta perlu dilibatkan, yang jelas semuanya pasti memiliki peran masing-masing misalnya peran masyarakat sebagai apa, swasta ataupun pemerintah itu sendiri. Jadi menyesuaikan dengan porsinya masing-masing”.

“Pernah kami melakukan study banding ke kab. Badung Bali disana sistemnya setiap desa didorong untuk mengajukan sebuah proposal sebuah destinasi wisata, kemudian dilakukan perlombaan/kompetisikan setiap destinasi tersebut lalu dijaring sekiranya yang layak untuk dijual. Jika destinasi desa itu mampu membayai menggunakan DD dan ADD berarti kami memasrahkan pengelolaan itu kepada desa, pemerintah hanya memfasilitasi sarana dan prasarana saja. Namun jika desa

tidak mampu membiayainya dalam pengembangan wisatanya kami libatkan pihak swasta tetapi dalam artian destinasi tersebut berskala besar dapat dijual kepada publik, Salah satu contoh pantai pandawa.”

Dalam hal ini pihak swasta juga ikut mendukung pengembangan wisata yang ada melalui ikut melakukan promosi terkait dengan travel atau perahu yang akan disediakan untuk menuju wisata Pulau Gililabak. Demikian juga upaya yang dilakukan biro dalam membantu pengembangan pariwisata di sumenep, yaitu dengan melakukan promosi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskur pemilik biro Kampongimaji yang menyatakan bahwa:

“Iya dengan cara saling mempromosikan antara biro dan dinas selaku pemerintah, jadi melalui medsos kami mempromosikan wisata-wisata yang ada di kabupaten sumenep ini, intinya saling menguntungkan lah seperti itu. Jadi diharapkan kita saling mensupport lah artinya kita saling mendukung karena destinasi itu juga penting karena tanpa destinasi biro gak akan ada, itupun tanpa dinas yang ikut mempromosikan kita juga gak jalan, iya tetep saling mempromosikan lah intinya itu yang diharapkan.”

Menciptakan pelayanan maksimal dibutuhkan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maskur pemilik biro Kampong imaji yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama itu sudah pasti, memang alat transpot seperti mobil juga kapal perahu itu sudah ada namun masih terbatas. Tergantung pelayanannya juga mbak, kalau ke gililabakkan gak mungkin kita bawa kapal sendiri dari tanjung atau dari kalianget, jadi untuk perjalanan ke gililabak kerjasamanya dengan pemilik perahu menuju gililabak. Kemudian hotel itu juga tergantung permintaan klien, jadi misal mereka minta fasilitas yang oke kita usahakan di hotel C1 atau enggak di hotel Musdalifah itu kita sudah kerjasamanya, tapi kalau resto masih belum karena biasanya sudah disiapkan oleh hotel terkait makanan.”

Dinyatakan oleh bapak **Sufiyanto**, bahwa Disparbudpora juga melakukan pembenahan, seperti hotel, penambahan trayek penerbangan atau *flight*, serta sarana dan prasarana di destinasi wisata khususnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan luar kota. Karena respon masyarakat dan para pemilik hotel juga sangat mendukung program Visit Sumenep ini (*dikutip* <https://jatim.antaranews.com/berita>)

“Karena itu, kami berharap seluruh stakeholder dan elemen masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan tahun Kunjungan Wisata Sumenep ini, sehingga juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat”.

Disampaikan oleh Bapak Maskur (pemilik biro travel Kampong imaji) yang sangat mendukung pengembangan pariwisata dan sangat mendukung visit Sumenep 2018, bahwa keberadaan biro di Kabupaten Sumenep telah

menjadi keharusan dalam mendukung Visit Year 2018, sebagaimana wawancara berikut:

“Sumenep sudah memenuhi syarat untuk dijadikan daerah wisata, dan sekarang destinasinya sudah banyak terlebih lagi kita memiliki wisata baru yang tidak kalah dengan wisata yang ada diluar seperti sekarang adanya wisata Gililabak. Jadi kita membentuk biro karena alasannya ya itu, Sumenep bisa dijadikan tempat wisata untuk orang luar seperti jawa bahkan manca. Disitulah kami berpikiran untuk membentuk biro.”

“Kalau kita punya trip itu biasanya untuk wisata ke gili labak, pantai sembilan, terus giliyang, dan yang wajib untuk dijunjungi oleh wisatawan adalah keraton sumenep, museum, pasti itu dikunjungi kalo wisatawan harus menginap karena hal itu penting untuk memperkenalkan sumenep ”

Usaha yang dilakukan oleh bapak Maskur untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke Sumenep yakni dengan memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan yang datang, disamping itu juga mempromosikan wisata yang ada di Sumenep sebagaimana disampaikan:

“Jadi paling gampang untuk mempromosikan wisata itu ya melalui medsos, tapi ya kita juga melalui perorangan, artinya kita mempromosikan melalui pengunjung yang sudah memakai jasa biro kita dengan memaksimalkan service, tapi lebih gampang sekarang melalui medsos ”.

“kalau untuk menyerap wisatawan, kita paling utamakan service sehingga wisatawan itu bisa kerasan di Sumenep. jadi wisatawan bisa memilih sendiri biro yang mana yang hendak dipilih ketika berkunjung ke Sumenep, ini termasuk promosi perorangan tadi. Selama menerima tamu kita jelaskan tentang bagaimana wisata yang akan dikunjungi. Misalkan ke Gili Labak, itu kita jelaskan bagaimana gili labak, bagaimana silsilahnya, terus bagaimana keadaan disana, dan apa yang penting disananya gitu. Dan selama kita membawa klien asing mereka mau dengan aturan kita seperti tidak menggunakan bikini disini, saya pernah bawa wisatawan dari singapura, thailand juga pernah sebelum kita jelaskan peraturan disini malah mereka duluan yang tanya. Dengan demikian seperti transpot menuju lokasi, tempat makan itu penting juga.”

Selain itu masyarakat juga menilai peran dari pihak swasta untuk tahun yang lalu memang ada misalkan dengan adanya toko-toko souvenir baju Pulau Gililabak dan toko-toko yang menyediakan makanan dan kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke pulau Gililabak, seperti yang disebutkan oleh Bapak Abd Jalil Ketua RT 5 RW 3 yang menyatakan bahwa :

“Kalau dulu, tahun lalu lah dimana pemerintah masih gencar-gencarnya melakukan pengembangan wisata Gililabak memang ada toko-toko souvenir baju yang bertuliskan pulau Gililabak ada dari pihak swasta yang ikut serta dalam menyediakan semacam itu tapi kalau untuk sekarang karena semakin hari pengunjung semakin

sedikit yah mereka pulang gulung tikar, dapat dilihat sendiri lah kondisi wisata yang sekarang” (28 April 2019)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ke tempat wisata Gililabak memang ditemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang semakin berkurang dari pada tahun lalu, hal ini mungkin yang menyebabkan banyak toko yang sudah tutup atau gulung tikar, selain itu juga terdapat beberapa bantuan yang berasal dari Santos seperti saung, tempat santai dan beberapa Gazebo dan sebagainya yang membantu melengkapi fasilitas wisata Gili labak, dilihat dari segi peran swasta terhadap pengembangan wisata Gililabak memang dapat dikatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari segi kerjasama dalam mengunjungi Kawasan wisata ini.

C. Peran Masyarakat

Peran masyarakat merupakan faktor penting dalam mengembangkan pariwisata terutama dalam hal ini wisata yang akan dikembangkan berada di pulau yang diketahui bahwa masyarakat pulau merupakan tipe masyarakat tradisional sehingga dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi terkait dengan pengembangan wisata pulau Gililabak. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan wisata karena masyarakatlah yang akan menjadi pioner wisata sehingga diharapkan memang masyarakat terbuka terhadap wisatawan yang hadir dengan memperhatikan keramahan,

responnya terhadap wisatawan dan menyediakan pelayanan yang terbatas untuk pengunjung.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu untuk mendukung pengembangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan ikut serta dalam mempromosikan wisata yang ada, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah, menyediakan pelayanan yang baik dengan menyediakan makanan, tempat penginapan dan kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh pengunjung wisata pulau Gililabak. Peran masyarakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar mereka peduli akan lingkungan yang ada sehingga selalu menjaga lingkungan wisata akan tetap menjaga keindahan pulau Gililabak tanpa adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain hal tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mempersiapkan sumber daya pariwisata adalah

“Untuk Peran masyarakat sendiri mereka sangat terbuka terhadap pembaruan yang ada yang terkait dengan pengembangan wisata oleh karena itu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep membentuk dan membina kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia kepariwisataan, jadi untuk masyarakat sendiri kami telah memberikan ruang untuk ikut terlihat dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan dengan melalui adanya pokdarwis”.

Sebagaimana disampaikan juga oleh bapak Sufiyanto, SE, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumenep. (dikutip dari <https://jatim.antaranews.com>)

“Pemberdayaan pokdarwis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus sinergi. Dan kami menginginkan pokdarwis yang sudah ada di masing-masing desa yang memiliki potensi dan objek destinasi wisata itu memiliki pemahaman sama dengan kami dalam rangka mengembangkan kepariwisataan khususnya wisata Gililabak, masyarakat disana sudah cukup respon terhadap pengembangan wisata, responnya itu seperti membuka warung makan, menyediakan tempat penginapan dan sebagainya”.

Disampaikan pula harapan beliau terhadap peran pokdarwis dalam turut serta mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumenep, yaitu :

“Berharap kepada pokdarwis bisa menjadi katalisator bagi terwujudnya karakter peduli wisata bagi warga di masing-masing desa, dan kami harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk mengembangkan wisata di Sumenep. Pembinaan dan pengembangan pokdarwis tersebut juga dalam rangka percepatan penyiapan sumber daya manusia kepariwisataan menyongsong Tahun Kunjungan Wisata Sumenep 2018. Sedangkan ketersediaan fasilitas, pemerintah mendorong pokdarwis di masing-masing

destinasi wisata setempat menyediakan fasilitas penunjang untuk kenyamanan para pengunjung wisata”.

Disampaikan pula bahwa oleh bapak **Ir. Agus Suprayogi** Sekretaris Badan Lingkungan Hidup adalah:

“Wisatawan itu biasanya bawa sampah, bawa makanan, bawa air mineral, nah itu juga dibutuhkan pembinaan kepada para nelayan untuk bantu merawat lingkungan, misal ada tempat sampah diperahunya. Jadi ada pelatihan untuk mereka juga, dilakukan oleh BLH tahun yang lalu itu pas pada saat gililabak mulai terkenal itu ada semacam sosialisasi yang melibatkan pokdarwis sana, kemudian masyarakat sekitar pariwisata itu sendiri, kita diminta untuk memberikan pelatihan bagaimana untuk pengolahan sampah. Ada beberapa tempat wisata yaitu Gililabak selama ini juga respon masyarakatnya positif terhadap pengelolaan sampah”.

Namun keberadaan Visit Sumenep dirasakan pula dampaknya oleh masyarakat sekitar daerah wisata yang disampaikan oleh Bapak H. Achmad Bruji yang menyatakan :

“Kalau untuk dampak saya rasa itu sudah memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat sekitar tempat wisata itu sendiri. Kemarin itu sebelum adanya visit dan setelah adanya visit pasti ada bedanya. Seperti di gili labak itu masyarakatnya banyak yang buka usaha, mereka buka warung semua terus rumah-rumah warga itu rata-rata disewakan untuk homestay para wisatawan, satu

malam dua ratus ribu per rumah. Itu saja sudah memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar”.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Abd Jalil menambahkan :

“Kalau kami mewakili masyarakat disini telah melakukan pelayanan yang terbaik lah menurut kami, kami telah menyediakan kebutuhan penginapan, makanan dan minuman serta kami melakukan pemeliharaan terhadap wisata ini, kami sebisa mungkin menjaga lingkungan dipulau ini, kami mengumpulkan sampah dan diolah sesuai dengan pembinaan yang dilakukan oleh BLH, kami juga sebisa mungkin mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan itu semua bisa dibidang kami telah memiliki kontrol sosial untuk menjaga lingkungan”

Disampaikan oleh Bapak Maskur (pemilik biro travel Kampongimaji) yang sangat mendukung pengembangan pariwisata Gililabak yang menyatakan :

“Kalau saya melihat peran dari Masyarakat itu sendiri, mereka cukup respon terhadap pengembangan wisata Gililabak, hal ini dapat kita lihat dengan penyediaan perahu yang disediakan oleh masyarakat sekitar untuk melayani pengunjung yang datang, selain itu juga mereka mampu untuk mempromosikan wisata Gililabak, kalau yang saya lihat pemeliharaan lingkungan disekitar pantai juga baik, masyarakat disana sadar kebersihan lingkungan wisata”

Berdasarkan observasi yang dilakukan ke pulau Gililabak, memang pada dasarnya Peran masyarakat telah terlihat dengan kebersihan lingkungan disekitar pantai yang dapat dikatakan bersih, kebersihan kamar mandi juga menjadi salah satu hal yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam artian masyarakat mulai sadar akan memelihara dan menjaga lingkungan wisata, selain itu sebelumnya Pokdarwis yang berada di Gililabak telah mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan mendirikan warung-warung makanan untuk pengunjung, meskipun pada saat ini pokdarwis wisata Gililabak telah keluar untuk bekerja sehingga yang melakukan pelayanan disana adalah masyarakat sendiri.

BAB 8 ANALISA IMPLEMENTASI PERAN *TRIPLE HELIX*

Penelitian yang dilakukan di Pulau Gililabak dapat diketahui bahwa Konsep dari *Triple Helix* yaitu kerjasama antaraktor penting seperti Pemerintah, pihak swasta dan Peran Masyarakat dalam pengembangan wisata diperlukan penguatan terhadap peran masing-masing aktor yang terkait sehingga dengan penguatan peran dari tiap-tiap aktor dapat membentuk kerjasama yang maksimal, wawancara yang dilakukan baik dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat memberikan pendapat yang hampir sama terhadap pengembangan wisata yang akan dilakukan, para aktor tersebut ikut mendukung yang dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi berdasarkan beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan memberikan analisa yang berbeda dari setiap pelaku atau aktor pembangunan dan pengembangan wisata, beberapa analisa tersebut dapat dijelaskan dalam peran setiap aktor.

A. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor kunci dalam pengembangan pariwisata, perannya sebagai perencana, pengambil keputusan dan implementasi harus dikuatkan dengan komitmen yang kokoh dalam menjalankan pengembangan wisata, sehingga wisata yang akan dikembangkan harus berdasarkan atas perencanaan yang matang dan diatur dalam regulasi yang ditetapkan. Komitmen pemerintah tidak hanya berlaku untuk tahap

implementasi saja akan tetapi ada tahap kontrol dan evaluasi sebagai bahan perbaikan terhadap tindakan selanjutnya. Hal ini berarti setiap program yang dicanangkan atau akan dilaksanakan memiliki program yang berkelanjutan, begitupun juga dengan program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan wisata, ada titik lanjut untuk dilakukannya evaluasi terhadap pengembangan yang dilakukan.

Pemerintah berperan sebagai regulasi, dengan memberikan batas-batas terhadap pengembangan wisata yang akan dilakukan sehingga dengan adanya regulasi ini maka pihak swasta maupun masyarakat dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan merusak lingkungan wisata, selain itu pemerintah juga mengikut sertakan pihak swasta untuk ikut terlibat dalam melakukan investasi terhadap pengembangan wisata, begitupun dengan pengembangan wisata yang dilakukan di Gililabak, ada pihak swasta yang ikut serta dalam menyumbang dan memberikan investasi pada wisata Gililabak, seperti yang terlihat pada saat observasi banyak sumbangsih pihak swasta dalam pengembangan wisata Gililabak, hal ini berarti Pemerintah mampu menarik investasi pihak swasta dengan memberikan perannya sebagai pihak penyambung kerjasama antara Pemerintah dan Swasta.

Peran pemerintah juga dikuatkan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang pengembangan wisata Gililabak, dalam hal ini peran pemerintah kaitannya jauh lebih besar dengan peran yang lain sebab program

pengembangan wisata yang dilakukan pemerintah sebagai fasilitator merupakan peran penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan wisata yang akan dilakukan. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dan kerjasama disetiap Organisasi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan program pengembangan sehingga program yang dilakukan akan mendapatkan sinergi yang baik antarinstansi. Berdasarkan faktanya memang banyak alat-alat yang didukung oleh instansi pemerintah, seperti bantuan *speedboard* yang berasal dari Dinas Perikanan dan kelautan provinsi, Disparbud memberikan dukungan berupa tandon oksigen, gazebo, untuk PU Cipta karya dengan mendukung membangun MCK, kamar mandi, tandon air tawar. Sedangkan untuk BPBD melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pulau tersebut dua kali dalam seminggu, kontrol yang dilakukan oleh BPBD ini sebagai bentuk pengawasan lingkungan wisata pulau Gililabak.

Setiap Organisasi Pemerintah Daerah pada dasarnya harus saling mendukung program pengembangan wisata sehingga dengan dukungan ini maka pengembangan yang dilakukan akan menghasilkan wisata yang sesuai dengan keinginan pengunjung, tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Gililabak memiliki pesona alam yang indah, pasir putih dan keindahan bawah laut yang memukau sehingga dengan potensi ini maka dukungan dari berbagai instansi diperlukan untuk menyukseskan pengembangan wisata Gililabak. Seperti yang dilakukan oleh instansi Kabupaten

Sumenep yang memberikan pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi solar dengan adanya bantuan alat. Bentuk pelatihan yang dilakukan akan mengajarkan masyarakat menjadi mandiri untuk mengelola sampah yang ditimbulkan oleh pengunjung.

Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan bantuan untuk membangun puskesmas pembantu di Gililabak, serta memberikan layanan *chek up* gratis setiap hari sabtu untuk masyarakat Gililabak. Perhatian yang ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bentuk dukungan menjaga kesehatan masyarakat dengan mengontrol kesehatan masyarakat.

B. Peran Swasta

Peran swasta dalam pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dilihat dari sumbangsih investasi pembangunan dan pengembangan wisata, sebab jika pembangunan hanya dilakukan oleh Pemerintah tanpa melibatkan pihak swasta maka anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah tidak cukup memadai untuk menyukseskan pengembangan wisata, oleh sebab itu dibutuhkan dukungan peran dari Swasta untuk membangun dan mengembangkan wisata. Dalam hal ini pihak swasta terlibat langsung dari segi implementasi program. Dalam hal evaluasi sebenarnya peran swasta juga dibutuhkan, keperluan akan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ditahap selanjutnya sehingga kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat akan terus

berlanjut sehingga wisata yang akan dikembangkan menuju sukses.

Investasi anggaran yang didukung oleh swasta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan dikawasan wisata, begitupun juga dengan wisata Gililabak banyak sumbangsih yang diberikan oleh pihak swasta untuk mendukung pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini terlihat pada saat observasi, bangunan-bangunan yang diberikan oleh swasta seperti pembangunan *icon* “Pulau Gililabak” yang dibangun oleh BPRS kabupaten Sumenep, dari Pihak Santos yang memberikan banyak peralatan penunjang pariwisata seperti panggung acara, tikar, kursi malas/santai, kursi plastik perlengkapan jika ada acara, *sound sistem*, rumah singgah, payung pantai, gazebo, dan penyerap panas matahari. Bantuan yang diberikan oleh pihak swasta ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam pengembangan wisata sehingga dengan bantuan ini pemerintah akan lebih memfokuskan terhadap sarana dan prasarana yang lain ataupun difokuskan dari segi promosi yang akan dilakukan.

Dukungan yang diberikan oleh Santos juga memberikan manfaat bagi pemerintah apabila ada tamu kunjungan yang berasal dari luar kota ada panggung acara yang disediakan sehingga dalam hal ini bukan hanya pemerintah yang mempromosikan wisata. Peran dari swasta bukan hanya berhenti dalam implementasi investasi akan tetapi juga harus berlanjut terhadap tahap berikutnya

seperti evaluasi, dengan pelibatan swasta pada saat evaluasi program pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah maka pihak swasta juga akan memberikan dukungan berupa investasi untuk pengembangan berkelanjutan.

Pada tahun 2018 dengan adanya program visit Sumenep ada beberapa usaha-usaha yang masuk kedalam wisata guna ikut serta dalam menyukseskan program tersebut, dengan adanya usaha toko *souvenir* baju Pulau Gililabak merupakan salah satu bentuk dukungan swasta dalam pengembangan wisata akan tetapi pada saat dilakukannya observasi ke pulau Gililabak telah banyak toko-toko yang tutup atau gulung tikar yang disebabkan jumlah kunjungan wisata ke pulau ini berkurang sehingga banyak masyarakat terutama pemudanya keluar pulau untuk bekerja. Hal ini tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah ataupun swasta karena masih belum mampu untuk mengembangkan wisata pulau Gililabak dalam jangka panjang dan berkelanjutan bukan hanya sementara atau sesaat.

Selain itu, pihak swasta masih belum berpartisipasi dalam pengembangan wisata, hal ini dapat dilihat dengan investasi yang diberikan di kawasan wisata yang masih belum mendukung dilihat dari segi investasi, hal ini dikarenakan pengembangan wisata yang akan dilakukan oleh pemerintah hanya akan bertahan beberapa waktu sehingga melihat keadaan ini pihak swasta tidak memberikan investasi dalam pengembangan wisata hanya

saja untuk mendukung hal tersebut beberapa pihak memberikan bantuan fasilitas menunjang pariwisata Gililabak seperti gazebo, kursi malas, payung pantai, dan sebagainya.

C. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengembangan wisata dapat dilihat dari segi partisipasi yang diberikan, mulai dari partisipasi pengambilan keputusan, implementasi, formulasi, dan evaluasi. Dengan pelibatan ini maka masyarakat akan memiliki peran untuk mengendalikan kontrol sosial dilingkungan wisata. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek akan tetapi akan diperlakukan sebagai subyek yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah. Masyarakat memiliki peran yang lebih kuat dalam hal menggerakkan sumber daya yang ada dilingkungan wisata sehingga masyarakat perlu melakukan pemberdayaan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan wisata pulau Gililabak.

Selain itu peran masyarakat yang tidak kalah penting yaitu peran partisipasi dalam menjaga dan merawat wisata yang ada, dengan berusaha melakukan kontrol terhadap pengunjung yang merusak lingkungan sedangkan untuk masyarakat pulau Gililabak sendiri telah memiliki kesadaran akan menjaga lingkungan supaya tidak rusak, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemeliharaan

sarana dan prasarana wisata yang ada disana, menjaga lingkungan wisata dari pencemaran lingkungan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, menjaga karang, dan biota laut. Kesadaran masyarakat akan hal ini telah ada di masyarakat Gililabak.

Masyarakat mampu merespon pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan menyediakan pelayanan yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah seperti penyediaan warung dan toko yang menyediakan kebutuhan dari pengunjung sehingga pengunjung yang datang ke wisata tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Masyarakat pulau Gililabak juga menyediakan tempat penginapan bagi pengunjung dengan menyediakan tempat yang nyaman. Peran masyarakat juga dapat dilihat dari segi partisipasinya dalam menjalankan pokdarwis yang dibina oleh instansi terkait. Masyarakat merasa pembinaan yang dilakukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengembangan wisata Gililabak.

Rencana pembangunan dan pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah mendapat dukungan dari pihak masyarakat dengan adanya beberapa fasilitas yang disediakan oleh masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan akan tetapi masyarakat sudah menjadi subjek pembangunan yang ikut serta dalam pengembangan wisata yang akan dilakukan, begitupun juga masyarakat harus ikut serta dalam setiap rencana yang akan dilakukan oleh

Pemerintah. Peran masyarakat dalam mengelola wisata juga ikut dirasakan oleh masyarakat Pulau Gililabak. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan sudah dilakukan secara mandiri, tanpa keterlibatan dari Pemerintah.

Dalam hal ini masyarakat mulai hadir untuk memberikan peran dalam pengembangan wisata, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan pemerintah akan tetapi dalam hal ini masyarakat Gililabak juga ikut merumuskan dalam mengelola wisata Gililabak. Meskipun jumlah kunjungan wisata ke Pulau Gililabak menurun drastis di tahun 2019, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk berhenti merawat fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah dan Pihak Swasta. Masyarakat mulai mandiri untuk mengurus wisata itu sendiri. Kunjungan wisata yang semakin menurun disebabkan oleh tidak adanya keamanan dalam perjalanan sehingga wisatawan merasa khawatir terhadap cuaca dan kondisi gelombang laut. Untuk itu diperlukan peran Pihak Pemerintah dan Swasta untuk membantu permasalahan tersebut. Seiring dengan berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gililabak menyebabkan Pokdarwis yang dibentuk keluar kota untuk mencari pekerjaan lain dan meninggalkan gililabak.

BAB 9 PERAN *TRIPLE HELIX* DALAM KAJIAN TEORI

Pembangunan dan pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya membutuhkan dukungan dari beberapa pihak yang lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pulau Gililabak dapat dibandingkan dengan teori pengembangan wisata. Konsep *Triple Helix* disandingkan pula dengan keadaan yang sebenarnya terkait dengan penguatan peran dari tiap-tiap aktor pembangunan dan pengembangan wisata.

Pada dasarnya konsep *Triple Helix* ini melibatkan kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan masyarakat untuk saling memberikan dukungan serta perannya dalam pengembangan wisata. Sulistiyani (2017:97-99) menerangkan peran dari setiap aktor yang tergolong dalam Konsep *Triple Helix* yaitu Peran Pemerintah, Peran Swasta, dan Peran Masyarakat dalam menyukkseskan pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor penting dalam pengembangan pariwisata, oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menjembatani antara pihak swasta dan masyarakat untuk saling bersinergi memberikan dukungan positif untuk pengembangan wisata. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai regulator untuk menciptakan dan membatasi kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengembangan wisata. Dibutuhkan

perencanaan yang matang dari berbagai pihak-pihak yang lain seperti dukungan dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah untuk mendukung program pengembangan yang akan dilakukan. Dibutuhkan sistem yang mengatur untuk menciptakan wisata yang baru, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengatur mengenai pengembangan wisata khususnya untuk mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata yang akan dibangun dan dikembangkan. Pemerintah sebagai pembuat keputusan harus memiliki rambu-rambu kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut

([http://digilib.unila.ac.id/3058/15/BAB%20II. pdf](http://digilib.unila.ac.id/3058/15/BAB%20II.pdf). diakses pada tanggal 03 Agustus 2018) :

- a. Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata, dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang kawasan wisata Gililabak hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan antarorganisasi Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung pengembangan wisata ini, seperti yang terlihat banyak bantuan yang diberikan oleh OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Badan lingkungan hidup, Dinas kelautan dan perikanan provinsi, PU cipta karya yang ikut serta dalam pengembangan wisata Kabupaten sumenep selain itu juga melibatkan pihak swasta seperti BPRS, Santos, dan masyarakat juga terlibat dalam partisipasi dalam mendukung pariwisata tersebut. Dengan hal tersebut

maka pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perencanaan tata ruang wisata, hanya saja wisatawan yang ingin ke pulau Gililabak masih bingung dengan penetapan dermaga, pemerintah daerah juga masih belum menetapkan Dermaga tertentu yang dapat dilalui sebelum berkunjung ke Gililabak;

- b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata. Meningkatkan aksesibilitas merupakan bagian penting dari adanya pengembangan wisata Gililabak, dalam observasi yang dilakukan aksesibilitas ke pulau Gililabak masih kurang memadai hal ini dikarenakan Dermaga yang ada masih belum maksimal dalam penyediaan transportasi ke pulau Gililabak, untuk berkunjung ke wisata Gililabak saja kita harus memesan perahu terlebih dahulu karena memang tidak ada Dermaga khusus transportasi ke Gililabak, masih kurangnya akses ini menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan, untuk tahun 2018 memang ada beberapa paket wisata yang menawarkan untuk pergi ke Gililabak hal ini karena memang berkaitan dengan program Pemerintah Daerah sehingga para pemilik perahu atau transportasi laut menawarkan paket wisata, akan tetapi untuk melihat perkembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada tahun 2019 memang wisatawan kesulitan dalam menemukan paket wisata ke Gililabak karena memang pihak-pihak penyedia perahu yang dulu sudah berhenti

jadi untuk pergi ke Gililabak harus memesan perahu jauh hari sebelum keberangkatan;

- c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah telah mampu memberikan fasilitas standar seperti dibangunnya fasilitas puskesmas pembantu dengan adanya *chek up* gratis, untuk kebersihan sendiri Pemerintah Daerah menggandeng Dinas lingkungan hidup dalam menyediakan tempat sampah dan cara mengelola sampah plastik, dan untuk keamanan dalam transportasi laut masih belum ada standar keamanan yang memadai sehingga untuk perjalanan ke wisata Gililabak masih minim fasilitas keamanannya hal ini juga yang menyebabkan jumlah wisatawan semakin berkurang.
- d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk fasilitas penunjang lainnya, swasta mungkin berperan dalam melengkapi fasilitas wisata Gililabak seperti bantuan kursi, panggung, Gazebo dan sebagainya akan tetapi untuk pembangunan fasilitas seperti perahu yang beroperasi setiap saat masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta oleh sebab itu pemerintah masih belum mampu untuk menarik investor.

Pada dasarnya dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata faktor kunci untuk kesuksesan pengembangan wisata terletak pada Pemerintah selaku

regulator dalam pembangunan ini. Dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang yang melibatkan banyak pihak untuk saling bekerjasama dalam membangun pariwisata pulau Gililabak. Organisasi Pemerintah Daerah dituntut untuk mendukung dalam melaksanakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

Peran utama dari Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan wisata Gililabak dimulai dengan membangun sarana dan prasarana wisata Gililabak sehingga dengan dibangunnya sarana dan prasarana wisata akan membantu investor untuk ikut bekerjasama dalam membangun wisata Gililabak. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Yoeti (2016:77) yang menyatakan peran pemerintah sebagai regulator atau sebagai pembuat kebijakan dapat secara langsung membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dengan bekerja sama dengan swasta serta pelibatan masyarakat daerah tersebut sehingga memiliki dampak baik untuk mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja. Proyek-proyek yang akan dibangun seperti : pembuatan jalan Ke obyek wisata, jembatan, pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih, pembangunan tempat-tempat rekreasi, objek wisata, angkutan wisata, terminal dan lapangan udara, hotel, restoran, biro perjalanan, *souvenirshop* dll sebagai penunjang fasilitas pariwisata.

Pemerintah Daerah telah membangun sarana dan prasarana terminal dan lapangan udara serta perlengkapan

hotel dan biro perjalanan untuk menuju ke objek wisata di Kabupaten Sumenep, akan tetapi untuk wisata Gililabak karena wisata tersebut menggunakan jalur laut sulit untuk dijangkau karena keterbatasan perahu yang tidak setiap hari beroperasi kepulau tersebut selain itu keamanan dijalur laut masih belum ada kepastian keamanan karena minimnya perlengkapan jalur laut. Sedangkan untuk menyediakan air bersih telah disiapkan tandon air tawar yang disediakan oleh Dinas terkait, untuk hotel dan penginapan masyarakat telah menyiapkan rumah dengan menyediakan makanan dan minuman khas Pulau Gililabak. Untuk penyediaan *souvenir* khas pulau Gililabak masih belum adanya toko yang menyediakan tersebut sehingga untuk mendapatkan *souvenir* dari wisata ini masih belum ada karena minimnya pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat disana.

B. Peran Swasta

Swasta memiliki peran untuk ikut dalam pembangunan dan pengembangan wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah, pihak swasta berperan membantu penyediaan fasilitas yang tidak bisa dijangkau atau disediakan oleh Pemerintah. Swasta dapat memberikan investasi pembangunan wisata, yang menjadi dasar Pihak swasta memberikan investasi terhadap pembangunan dan pengembangan wisata yaitu faktor untung rugi dalam memberikan investasi tersebut sehingga apabila peluang pembangunan yang dilihat dapat

memberikan keuntungan maka pihak swasta akan memberikan investasi untuk pengembangan wisata tersebut begitupun sebaliknya jika yang dilihat sebuah kerugian maka pihak swasta tidak akan memberikan investasi pembangunan. Sementara yang ikut serta dalam melengkapi fasilitas wisata Gililabak berdasarkan observasi yang ada hanyalah Pihak Santos, dengan memberikan bantuan fasilitas wisata seperti Gazebo, Kursi malas, sound, kursi karet, tikar, panggung acara, dan penyerap sinar matahari. Bentuk bantuan ini sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Santos dalam mendukung program Pemerintah. Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk CSR dari Santos. Pembangunan icon pulau Gililabak dibangun oleh BPRS Sumenep sebagai bentuk dukungan adanya pengembangan wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dengan menunjuk pemahaman yang jelas terkait dengan peran keduanya sehingga dengan memahami peran dari masing-masing maka akan dapat menyelesaikan pembangunan dan pengembangan wisata Gililabak, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta. Sementara untuk pembangunan dan pengembangan wisata Gililabak Pemerintah melakukan pembangunan dengan melibatkan Organisasi Pemerintah yang lain tanpa bisa menarik perhatian dari swasta, sementara itu pihak swastapun keikutsertaan dalam program pengembangan wisata hanya

berupa dukungan saja tanpa investasi yang berkelanjutan. Menurut Pitana dan Diarta (2009:113) Untuk mencapai kesuksesan dalam membangun pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Disisi lain pebisnis yang terlebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah.

Pelaku bisnis kurang berpartisipasi dalam pengembangan wisata Gililabak, beberapa hal yang masih belum ditetapkan oleh Pemerintah membuat pihak swasta sulit untuk masuk dalam pengembangan wisata Gililabak contohnya saja seperti penentuan dermaga untuk jalur laut dan penyediaan perahu untuk wisatawan yang masih belum koordinasi dengan baik sebab perahu tidak beroperasi tiap hari jadi wisatawan harus booking sebelum pergi ke pulau Gililabak, dengan belum terkoordinasi maka menyebabkan pihak biro perjalanan yang membawa wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Gililabak kesulitan dalam menentukan perahu, selain itu ada beberapa Dermaga seperti Dermaga di Talango, Dermaga Kalianget dan Dermaga di Pulau Giligenting yang membuat wisatawan merasa bingung.

Meskipun pulau Gililabak memiliki pesona alam yang indah akan tetapi kendala transportasi laut menyebabkan wisata tersebut tidak dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah begitupun Pihak swasta juga tidak berani untuk memberikan investasi pembangunan dan pengembangan wisata Gililabak karena dari pihak swasta telah dapat memprediksi perkembangan wisata Gililabak tidak akan bertahan dengan lama. Berdasarkan observasi yang dilakukan, memang wisata Gililabak banyak pengunjung ditahun 2018 pada saat gencar-gencarnya dilakukan promosi, sedangkan setelah itu wisata ini sepi pengunjung terbukti dengan banyak perahu yang mencari ikan daripada memuat wisatawan yang datang.

Meskipun pada dasarnya peran swasta menyediakan fasilitas dan kebutuhan pengunjung tetapi kalau melihat kondisi yang kurang menguntungkan maka pihak swasta akan mundur dari peran tersebut seperti halnya di tahun 2017-2018 ada pihak swasta yang menyediakan *souvenir* baju Gililabak yang mendirikan toko di wisata Gililabak kemudian karena kunjungan wisata yang semakin menurun dan daya beli wisatawan yang rendah menyebabkan toko *souvenir* ini tutup dan meninggalkan wisata Gililabak hal ini berarti keuntungan yang didapatkan sangat rendah sehingga pihak swasta memutuskan untuk gulung tikar. Dengan kejadian tersebut maka peran swasta dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan pengunjung menjadi belum maksimal dijalankan meskipun

secara teorinya peran swasta sangat dibutuhkan untuk membuat wisata Gililabak menjadi wisata yang terkenal dengan banyak pengunjung.

Dalam teorinya Menurut Yoeti (2016:12-13) menjelaskan bahwa peran swasta adalah membantu pelayanan bagi wisatawan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh swasta untuk menunjang kebutuhan dari wisatawan, pelayanan kebutuhan yang dibutuhkan dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Jenis Perusahaan	Produk yang Dihasilkan
<i>Travel agent/Agen Wisata</i>	Informasi paket wisata
Perusahaan penerbangan	<i>Seats</i> dan pelayanan lainnya
Angkutan pariwisata	Pelayanan transfer ke hotel, tujuan wisata
Akomodasi hotel	Kamar dan pelayanan lainnya
Restoran dan sejenisnya	Makanan dan minuman
<i>Impresariat, amusement</i>	<i>Entertainment dan atraksi wisata</i>
<i>Local tour operator</i>	<i>City tour</i>
Shopping center	Cendramata dan oleh-oleh
Bank	Penukaran dan pengambilan uang
<i>Retail stores</i>	Bermacam-macam keperluan perjalanan

Untuk kebutuhan seperti *travel agent*, perusahaan penerbangan, akomodasi hotel, restoran, bank, *shopping center*/pertokoan dan kebutuhan pengunjung terpenuhi di daratan sedangkan untuk wisata kepulauan masih sangat minim kebutuhan dari pengunjung atau wisatawan yang datang, pihak swasta telah mampu untuk melakukan promosi *tour* untuk kunjungan ke pulau Gililabak akan tetapi terkendala dengan perjalanan transportasi laut dan minimnya pemenuhan kebutuhan di pulau Gililabak, sehingga kadang kala wisatawan sendiri yang membatalkan untuk pergi ke Pulau Gililabak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Pemerintah berkomitmen dengan pengembangan wisata yang ada maka pihak swasta pun akan ikut berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah dan peran dari setiap aktor yang terlibat akan dipahami dan dilaksanakan dengan maksimal mungkin.

C. Peran Masyarakat

Pulau Gililabak memiliki pesona alam yang indah, dengan pesona ini Gililabak menjadi daya tarik untuk wisata pantai yang indah, selain itu, masyarakatnya terbuka terhadap perkembangan wisata, oleh sebab itu berdasarkan dengan potensi yang ada di wisata Gililabak telah memenuhi syarat dalam pengembangan wisata seperti yang dinyatakan oleh Yoeti (2001 : 177), hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik

untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

Pertama, Daerah itu harus mempunyai “*something to see*” yaitu harus mempunyai obyek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Wisata Gililabak memiliki pantai yang indah dan bawah laut yang memukau yang dapat menarik perhatian wisatawan dimana keindahan ini tidak dimiliki oleh daerah lain, pasir yang putih dan air yang jernih merupakan daya tarik dari wisata Gililabak, hanya saja dibutuhkan peran masyarakat untuk membuat pulau Gililabak memiliki atraksi wisata yang unik khas wisata pulau dengan atraksi atau kegiatan semacam ini akan menambah perhatian dari wisatawan, memiliki masyarakat yang terbuka merupakan hal yang positif untuk dilakukannya pengembangan wisata hanya dibutuhkan beberapa pendampingan dari Pemerintah supaya masyarakat mampu untuk mengelola wisata tersebut menjadi wisata yang unggul, dengan dibentuknya Pokdarwis selaku kelompok pemuda yang mampu untuk membuat wisata Gililabak menjadi wisata yang menarik.

Kedua, Di daerah tersebut harus mempunyai “*something to do*” di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, dan harus banyak disediakan fasilitas rekreasi atau *amusements* yang dapat membuat mereka betah di tempat itu. Untuk syarat yang kedua Pemerintah Daerah, bersama swasta dan masyarakat (Pokdarwis) berusaha untuk mengembangkan wisata

Gililabak menjadi wisata yang memiliki fasilitas yang lengkap meskipun pada dasarnya telah tersedianya kebutuhan yang disediakan oleh masyarakat disana seperti kebutuhan penginapan yang disediakan oleh masyarakat setempat, penyediaan makanan dan minuman ciri khas Pulau Gililabak meskipun penyediaan makanan dan minuman ini hanya sebatas menyediakan warung tentunya untuk wisatawan mancanegara belum cocok untuk diberikan fasilitas seperti ini akan tetapi ada usaha kemandirian dari masyarakat untuk menyediakan beberapa fasilitas. Sedangkan untuk atraksi atau kegiatan yang dilaksanakan tentunya dibutuhkan peran Pemerintah untuk ikut serta memberikan andil dalam menciptakan kegiatan atau atraksi wisata.

Ketiga, Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “*something to buy*”, ditempat tersebut harus tersedia *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagian oleh-oleh atau souvenir untuk dibawa pulang ketempat asal masing-masing. Selain itu juga harus ada sarana-sarana lain, seperti money *charger*, bank, kantor pos, kantor telpon, dan lain sebagainya. Untuk penyediaan *souvenir* dan kerajinan tangan masyarakat Gililabak masih belum ada kemandirian masyarakat yang seperti itu, meskipun dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melibatkan pokdarwis tetapi usaha tersebut masih belum mampu untuk memandirikan masyarakat Gililabak untuk melakukan usaha kerajinan tangan berupa oleh-oleh untuk wisatawan, meskipun begitu pelayanan yang diberikan

oleh masyarakat dapat dikatakan baik dalam melayani pengunjung. Penyediaan *souvenir* untuk pengunjung tidak dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu, dibutuhkan pemberdayaan yang bertahap agar masyarakat Gililabak mampu untuk menciptakan produk lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan wisata dapat dikatakan cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan wisata tetap baik tanpa adanya pencemaran lingkungan. Timbulnya rasa kepunyaan terhadap wisata Gililabak baik untuk pemeliharaan lingkungan pulau Gililabak. Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Antisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengerahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain dan memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan suatu proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta.

Nurhidayati (2018) sebagaimana yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:82) mendefinisikan pelibatan

masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk mendukung terjadinya perkembangan khususnya perkembangan wisata. Dalam teori yang diungkapkan oleh Nurhidayati menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata, hal ini berarti masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan memang pada dasarnya masyarakat dilibatkan dalam acara kunjungan wisata dari mancanegara dengan menyediakan makanan dan minuman dari khas pulau Gililabak sehingga dengan pelibatan ini Pemerintah menganggap masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus berperan aktif dalam pengembangan wisata yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Nurhidayati (2008) mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, bentuk pengembangan khususnya pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan yang akan dilakukan. Kedua, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata. Ketiga, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dengan distribusi keuntungan

kepada komunitas yang kurang beruntung. Dalam hal ini masyarakat bukan hanya merasakan dampak negatifnya saja seperti dampak kerusakan lingkungan dan sebagainya akan tetapi masyarakat juga ikut merasakan manfaat dalam pembangunan wisata ini dengan dibangunnya warung-warung yang dapat menambah keuangan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam model ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Model pengembangan ini sangat sesuai dengan karakter atau jenis obyek dan daya tarik wisata yang bertumpu pada sumberdaya wisata yang berhubungan langsung dengan masyarakat lokal.

BAB 10. RENCANA UPAYA PENGEMBANGAN WISATA

Upaya untuk meningkatkan dan menguatkan Peran *Triple Helix* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Gililabak sehingga menjadi wisata unggul yang memiliki daya tarik untuk wisatawan maka haruslah didukung kesadaran akan pentingnya kerja sama antaraktor yang terlibat dalam pembangunan ini seperti pemerintah selaku pembuat keputusan dan kebijakan terhadap wisata Gililabak, peran dari swasta selaku mendorong membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas pendukung lainnya, serta dibutuhkanannya peran masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola dan berpartisipasi dalam pengembangan wisata yang dilakukan di wisata Gililabak. Perencanaan yang akan dicapai untuk tahapan berikutnya dalam upaya untuk meningkatkan dan menguatkan peran *Triple Helix* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Gililabak Kabupaten sumenep yaitu :

1. Bentuk permasalahan terkait dengan masalah minimnya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan wisata Gililabak hal ini terkait dengan kunjungan wisata;
2. Koordinasi bersama masyarakat untuk secara mandiri mampu melanjutkan mengembangkan wisata Gililabak;
3. Memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai pelayanan/*service* terhadap wisatawan yang datang;

4. Memberikan pelatihan dalam membuat kerajinan tangan khas wisata Pulau Gililabak;

BAB 11. RINGKASAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN WISATA

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan Peran *Triple Helix* (Pemerintah, swasta, dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Pulau Gililabak Kabupaten sumenep belum terjalin kerjasama antaraktor pembangunan dan pengembangan wisata seperti antara Pemerintah dan swasta yang berjalan masing-masing dalam pengembangan wisata, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan akan tetapi dibutuhkan pembangunan yang bertahap. Hal ini dapat dilihat dari dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam mengembangkan wisata Gililabak masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya evaluasi dan keberlangsungan tahapan pengembangan berikutnya. Pemerintah masih belum berkomitmen dalam menjadikan wisata Gililabak menjadi wisata unggul, ketidakkomitmenan ini dapat dilihat dari setelah berakhirnya program visit 2018 berakhir maka berakhir pula pengembangan wisata tersebut;
2. Peran Swasta dalam pengembangan wisata hanya dapat dilihat dari segi promosi tanpa adanya dukungan yang nyata berupa investasi terhadap pembangunan wisata. Biro perjalanan, restoran, hotel dan sebagainya masih belum

mampu bekerjasama dengan pemerintah sehingga koordinasi dalam menyediakan fasilitas dan kebutuhan yang disediakan oleh swasta tidak berjalan dengan semestinya;

3. Peran masyarakat dalam menyediakan pelayanan dan kebutuhan pengunjung wisata Gililabak cukup maksimal dengan menyediakan penginapan, makanan minuman, pemeliharaan tempat wisata, hanya saja masyarakat masih belum mampu untuk memberikan *souvenir* yang dapat dijadikan oleh-oleh untuk pengunjung wisata Gililabak

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau rujukan bagi upaya penguatan peran *Triple Helix* (Pemerintah, swasta, dan Masyarakat) dalam pengembangan wisata Pulau Gililabak Kabupaten sumenep. Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam hal evaluasi program perlu dilakukan sehingga dengan evaluasi ini maka akan ada rencana selanjutnya mengenai pembangunan dan pengembangan wisata yang dilakukan;
2. Keterlibatan swasta dalam investasi dan penyediaan fasilitas pendukung untuk pengembangan wisata diperlukan partisipasi sehingga tidak selalu bertumpu pada Pemerintah;

3. Masyarakat secara mandiri mampu untuk menghasilkan produk lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. **Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.** (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012. **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat.** Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat.(1993). Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga,Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. (2007). **Metodologi Penelitian Kualitatif,** Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Pitana, dan Diarta, 2009. **Pengantar Ilmu Pariwisata.** Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET
- Sugiyono, 2017. **Metode Penelitian Kualitatif.** Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2017. **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.** Yogyakarta: Gava Media.
- Yoeti, Oka A, 2016. **Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.** Jakarta: Balai Pustaka.
- Fery Kurniawan, Robba Fahrisy Darus, Irfanudin Rizaki. 2017. **Kebutuhan Pengelolaan Wisata di Pulau Gili Labak, Sumenep : Euforia Destinasi Wisata Baru.** Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Pascasarjana Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB), Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB).

- Risma Rosita. 2017. Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap Wisatawan (Studi Kasus : Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep Madura). Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Firman Farid Muhsoni, Mahfud Efendy. 2016. Analisis Daya Dukung Pemanfaatan Pulau Gili Labak dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Kamal. Program Studi Ilmu Kelautan /Universitas Trunojoyo Madura dan Program Studi Ilmu Kelautan /Universitas Trunojoyo Madura.
- Dwi Indah N dan Cahyono Susetyo. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari di Gili Labak, Kabupaten Sumenep. Surabaya. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- [.https://astrisrirohrawati.files.wordpress.com/2015/03/keindahan-pulau-kecil-gili-labak-sumenep-madura.pdf](https://astrisrirohrawati.files.wordpress.com/2015/03/keindahan-pulau-kecil-gili-labak-sumenep-madura.pdf). diakses pada tanggal 31 Juli 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep. diakses pada tanggal 31 Juli 2018.
- <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/2660/3/BAB%20II.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43407/Chapter%20II.pdf?sequence=3>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/K5410017_bab2.pdf. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

http://erepo.unud.ac.id/16757/3/1091061006-3-BAB_II.pdf. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

<http://eprints.uny.ac.id/8536/3/BAB%202%20-%2008405241008.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/3058/15/BAB%20II.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.

<http://eprints.uny.ac.id/18655/6/BAB%20II.pdf>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018.